



# Kemendagri Akan Fasilitasi Jika Konflik Berlanjut

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Dalam Negeri berharap Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta segera menyelesaikan permasalahan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015. Namun, jika tak kunjung ada titik temu, Kemendagri siap memfasilitasi.

"Masalah di DKI Jakarta sebelumnya masalah administrasi pemerintahan daerah, murni masalah rumah tangga. Oleh karena itu, lebih baik jika masalah tersebut bisa diselesaikan sendiri," kata Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek di Jakarta, Kamis (19/2).

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD DKI Jakarta diharapkan membangun komunikasi yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan RAPBD tahun 2015. Tertundanya penyelesaian RAPBD merugikan penduduk Jakarta.

Selama RAPBD belum disahkan, program-program pembangunan tidak bisa dilaksanakan. Lebih dari itu, penyerapan anggaran untuk tahun 2015 berpotensi tidak bisa maksimal. Pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan DKI Jakarta juga hanya bisa menerima gaji pokok selama RAPBD belum disetujui Menteri Dalam Negeri.

"Format dan struktur dokumen ini sebenarnya sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya kini masalahnya ada perbedaan persepsi dari Gubernur dan DPRD terhadap substansi RAPBD. Jika perbedaan persepsi belum ada titik temu, kami belum bisa mengevaluasi RAPBD DKI," jelasnya.

Reydonnyzar mempersilakan Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD segera bersurat ke Mendagri Tjahjo Kumolo jika titik temu itu tidak juga terjadi. "Mendagri siap memfasilitasi, mempertemukan kedua belah pihak," ujarnya.

## Segera hak angket

DPRD DKI Jakarta menyatakan akan segera melayangkan hak angket atau hak untuk melakukan penyelidikan soal APBD DKI Jakarta 2015.

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak kemarin mengatakan, kesembilan fraksi di DPRD sudah setuju penggunaan hak angket itu.

"Sampai saat ini kami masih terus mengumpulkan tanda tangan anggota. Sekarang sudah lebih dari 50 persen anggota yang berasal dari semua fraksi memberikan tanda tangan. Ini sudah memenuhi syarat dan akan segera kami ajukan," ujarnya.

Jhonny menambahkan, penggunaan hak angket oleh DPRD merupakan hal yang biasa dalam praktik sebuah pemerintahan. Menurut dia, DPRD sepakat menggunakan hak angket kali ini sebagai bentuk koreksi terhadap eksekutif agar tidak melenceng dari aturan tentang pembahasan dan pengesahan APBD.

"Masyarakat juga perlu tahu bahwa tidak selamanya Gubernur benar," ujarnya.

Basuki menyatakan siap menjawab pertanyaan DPRD terkait APBD 2015, termasuk penggunaan hak angket. Dia menilai pangkal polemik eksekutif-legislatif saat ini relatif sederhana, yakni rincian anggaran yang dianggap beda. (FRO/APA)